

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan yang ada, hasil penelitian terkait implementasi program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran) di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Banyumas ini dapat disimpulkan bahwa:

##### **5.1.1. Banyaknya aktor yang terlibat**

Implementasi program Pelataran di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas menunjukkan komitmen pelaksanaan yang tinggi dari para implementor. Program ini dijalankan melalui sistem rotasi sistematis yang melibatkan seluruh pegawai ASN (PNS, PPPK, dan PPNPN) dari semua seksi secara merata, di mana tim yang bertugas ditunjuk bukan berdasarkan keahlian khusus melainkan atas prinsip pemerataan.

##### **5.1.2. Kejelasan tujuan program**

Tujuan program Pelataran di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas sudah jelas dan dipahami oleh semua pihak. Kejelasan ini terlihat dari kesamaan pemahaman pimpinan dengan arahan pusat, sasaran program yang spesifik pada pemohon langsung, hingga testimoni pengguna yang merasakan langsung manfaatnya. Dengan demikian, kejelasan tujuan tersebut menjadi dasar program, operasionalnya menggunakan SOP yang sudah ada memungkinkan pelaksana untuk berinisiatif secara efektif, meskipun tanpa adanya strategi formal yang terstruktur.

##### **5.1.3. Perkembangan dan kerumitan program**

Kerumitan program Pelataran bersumber dari penugasan staf (termasuk *back office*) secara bergiliran untuk bertugas layanan di *front*

*office*. Tantangan kesiapan ini diatasi secara mandiri melalui adaptasi seperti *sharing* ilmu antar pegawai, sementara pengembangan lainnya berfokus pada sosialisasi. Namun, keberlanjutan program tidak ditentukan dari hasil kinerja layanan di tingkat Kantor Pertanahanan, melainkan oleh kepatuhan pada instruksi dan hasil evaluasi dari tingkat pusat (Kementerian ATR/BPN).

#### 5.1.4. Partisipasi semua unit dalam implementasi program

Program Pelataran di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dalam implementasinya menghadapi tantangan dari segi kuantitas jangkauan partisipasi masyarakat yang masih rendah dan fluktuatif. Namun di sisi lain, program ini berhasil dari segi kualitas di mana manfaatnya telah dirasakan secara efektif dan berdampak tinggi bagi para pengguna yang berhasil dilayani.

#### 5.1.5. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program

Implementasi program Pelataran di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung utama yaitu ketersediaan sarana dan prasarana fisik yang memadai dan komitmen tinggi dari para pegawai. Namun, program ini menghadapi faktor penghambat yang signifikan yaitu pada aspek sumber daya anggaran, di mana ditemukan ketidaksesuaian antara ketiadaan kompensasi lembur di lapangan dengan instruksi pada Surat Edaran. Selain itu, faktor penghambat lainnya adalah rendahnya minat masyarakat yang disebabkan oleh budaya penggunaan perantara dan adanya program “layanan loket prioritas” yang menyasar audiens yang sama, serta keterbatasan sumber daya untuk melakukan sosialisasi secara masif.

## 5.2. Implikasi

Berdasarkan pada kesimpulan implementasi program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran) di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Banyumas yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan implikasi sebagai berikut:

### 5.2.1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas

1. Perlu adanya komunikasi yang lebih proaktif kepada pimpinan di tingkat wilayah atau pusat mengenai kebutuhan penyesuaian anggaran agar dapat merealisasikan kompensasi uang lembur untuk petugas Pelataran sesuai instruksi Surat Edaran demi menjaga motivasi jangka panjang pegawai.
2. Temuan mengenai kebutuhan petugas akan pembekalan perlu ditindak lanjuti dengan membuat sesi pelatihan atau *briefing* singkat yang terstruktur bagi petugas yang akan mendapat giliran pikut layanan Pelataran.
3. Perlu dilakukan evaluasi mengenai posisi program Pelataran dengan program “loket Layanan Prioritas” di hari kerja. Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dapat merumuskan upaya untuk membuat daya tarik tersendiri bagi program Pelataran atau melakukan sosialisasi yang lebih tertuju kepada masyarakat yang benar-benar tidak dapat mengakses layanan di hari kerja.

### 5.2.2. Bagi Kementerian ATR/BPN

1. Adanya ketidaksesuaian antara instruksi dan praktik di lapangan dalam hal kompensasi uang lembur menunjukkan perlunya monitoring dari pusat untuk memastikan Surat Edaran tidak hanya diadopsi namun juga diimplementasikan secara utuh di seluruh Kantor Pertanahan, terutama pada aspek yang sensitif seperti hak pegawai.
2. Temuan mengenai adanya program Pelataran dan loket Layanan Prioritas dengan sasaran serupa yang berpotensi mengurangi

efektivitas satu sama lain dapat menjadi masukan penting bagi pemangku kebijakan di tingkat pusat untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari kedua program tersebut. Perlu adanya kajian apakah kedua program perlu diintegrasikan, dibedakan, atau salah satunya lebih diprioritaskan.

3. Model implementasi bersifat “*top-down*” yang mengharuskan program Pelataran harus tetap berjalan meskipun sepi pemohon perlu ditinjau kembali. Kebijakan yang akan datang sebaiknya dirancang dengan memberikan sedikit fleksibilitas kepada Kantor Pertanahan untuk menyesuaikan frekuensi atau model layanan akhir pekan berdasarkan kondisi lapangan di daerahnya masing-masing.

